

PERANAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TAMPEMADORO KECAMATAN LAGE KABUPATEN POSO

Oleh : Imanuel N. Tadanugi

Abstrak : Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan secara berkesinambungan. Yang bertujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan juga mendukung program pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kantor Desa Tampemadoro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan jumlah informan yang di ambil adalah 17 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk masyarakat cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa tanggapan informan. Dalam tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat berjalan baik, sedangkan pemberdayaan masyarakat juga dapat berjalan baik, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berjalan baik, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum juga berjalan baik, dan terakhir pembinaan lembaga kemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan baik. Faktor – factor peghambat adalah minimnya sarana komunikasi berupa jaringan telepon kabel, terbatasnya sinyal telepon genggam dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Peranan, Pelaksanaan, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara dan juga partisipasi seluruh rakyat, pegawai negeri sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, dituntut sebagai motor penggerak tugas - tugas pembangunan dan pemerintahan tersebut. Segala ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di era pertumbuhan otonomi daerah sekarang ini yang banyak mendapat sorotan adalah kapasitas aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Olehnya sumber daya manusia yang berkualitas akan

memberikan manfaat yang sangat besar bagi organisasi berupa peningkatan efektifitas, efisiensi, moral, dan stabilitas serta keluwesan dalam penyesuaian diri dengan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan itu peranan aparatur pemerintah yang sampai saat ini menjadi suatu objek studi yang menarik, oleh karena pemerintah merupakan suatu kelompok yang memegang tugas penting dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan kehidupan masyarakat.

Salah satu peranan aparatur pemerintah desa yang menarik untuk dikaji adalah kontribusinya dalam rangka

pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di Desa Tampemadoro guna mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, produktifitas dan lain – lain. Dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa.

Apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan desa, pemerintah desa harus mengambil keputusan yang tepat sesuai keadaan wilayah dalam mengimplementasikan setiap kebijakan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses pembangunan tersebut. Aturan mengenai pemerintahan di desa telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa.

Setiap pejabat pemerintahan atau dari pimpinan suatu unit kerja sampai kepada aparatur yang paling bawah apapun bidang tugasnya dimanapun tempatnya dalam struktur organisasi pada tingkat manapun dalam hirarki pemerintahan harus selalu berusaha menunaikan tanggungjawabnya dengan sebaik – baiknya serta berusaha mencapai tujuan – tujuan ataupun sasaran – sasarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan.

Seorang pemimpin yang dikatakan berhasil dapat dinilai dari kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan secara operasional yang diikuti pula dengan kemampuannya menggerakkan orang - orang yang merupakan unsur pembantu dalam melakukan kegiatan operasional itu guna meningkatkan evekifitas kerja organisasi dapat tercapai.

Dalam pembangunan di wilayah pedesaan, maka kepemimpinan seorang Kepala Desa selaku aparat pemerintah daerah mempunyai peranan sangat penting terhadap proses pembangunan. Kepala Desa diharapkan juga mampu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang

keberhasilan dari pada proses pembangunan yang ada di wilayahnya lewat pengambilan keputusan yang merupakan kebijakan yang akan diimplementasikan atau yang akan dilaksanakan.

Jika diperhatikan, peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro belum optimal seperti peranan pemerintah desa dalam tugas belum memberdayakan lembaga – lembaga kemasyarakatan dengan baik. Selain itu kepala desa belum melakukan musyawarah desa bersama masyarakat untuk mengusulkan program pembagunan, akan tetapi pelayanan aparatur kepada masyarakat cukup baik dengan memperhatikan persoalan yang terjadi dimasyarakat, selain itu juga peranan aparatur desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan baik dengan melakukan pertemuan – pertemuan dengan ketua adat dan tokoh agama untuk memecahkn segala persoalan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Diakui bersama bahwa tugas - tugas yang diemban di desa makin kompleks, dimana ujung tombak penyelenggaraan pemerintah akan tergantung pada Desa sebagai salah satu wilayah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Mengingat semakin kompleksnya tugas yang diemban di Desa, maka diperlukan kemampuan dari seorang pemimpin yang handal dalam hal ini dituntut peranan seorang Aparatur Desa dalam pengambilan langkah - langkah kebijakan pada proses pembangunan. Dengan demikian Aparatur desa sebagai pemegang kendali dalam pengambilan kebijakan harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengabdian yang tinggi. Pada gilirannya kapasitas yang dimiliki oleh seorang Aparatur Desa diharapkan

pemerintah Desa akan memiliki kemampuan, tanggungjawab, serta dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pembangunan diwilayahnya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang proses pelaksanaan pembangunan masyarakat dengan menitikberatkan pada peranan aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

TEORI DAN KONSEP

Peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

Stogli (dalam Giroth 2003:25) memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat – sifat pribadi individu itu dari pada posisinya.

Menurut Ndraha (1990:116) disebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat.
- c. Memberikan stimulasi dan motifasi kepada masyarakat.
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternative dan mengambil keputusan.
- e. Pelopor dan pemberi motifasi.

Wibawa (2004:27) menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan

hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi.

Sedangkan Soekanto (2001:268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 2 hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari pola – pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Selanjutnya Judistira (dalam Giroth 2004:25) menyatakan bahwa, teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh :

- a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama.
- b. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankan.
- c. Apabila individu diharapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia akan berusaha

untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma – norma.

Artinya, peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, di samping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut serta jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma – norma yang lain.

Kemudian Siagian (2000:116) menyebutkan bahwa, peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai stabilisator, yang mengandung makna bahwa pemerintah harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul.
- b. Sebagai innovator, yang mana pemerintah harus bisa menjadi sumber ide baru terutama berhubungan dengan kegiatan pembangunan.
- c. Sebagai pelopor, pemerintah harus mampu memberikan contoh kepada seluruh masyarakat.

2. Konsep Aparatur

Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri. (WJS Poerwadarmita, 1983:165) Soewarno Handyaningrat (1 980:37) memberikan pengertian aparatur sebagai berikut :

- a. Aparatur ialah aspek - aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah/negari sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional Aspek - aspek administrasi itu terutama ialah : kelembagaan (Organisasi) dan kepegawaian.
- b. Kelembagaan pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan ialah mulai dan dari kelembagaan pemerintah pusat,

pemerintah daerah otonomi, dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan. Disamping terdapat adanya kelembagaan pemerintah yang bertugas dalam pelayanan keamanan dan ketertiban serta kelembagaan pemerintah yang bertugas dalam pelayanan jasa – jasa perbankan dan perekonomian.

- c. Kepegawaian pemerintah ialah mereka yang menduduki jabatan – jabatan pada lembaga - lembaga pemerintahan, lembaga keamanandan ketertiban, lembaga pelayanan jasa perbankan dan perekonomian.

Memperhatikan uraian tersebut adalah alat Negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur negara adalah alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Dengan mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan sehari - hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga orsanisasi fasilitas ketentuan pergaturan dan sebagainya. Adapun jenis - jenis aparatur sebagaimana dikemukakan oleh Victor Situmorang dan Jusuf Juhir (1998 : 83_86)

Ada 4 tipe kepemimpinan yang dapat digunakan untuk berbagai organisasi:

1. *Direktive*

Adalah salah satu tipe kepemimpinan tertua dan seringkali disebut juga pendekatan otoriter. Dalam tipe ini, pemimpin akan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dan mengharapkan mereka segera melakukannya.

2. *Participative*

Dalam tipe ini, pemimpin mencari input dari pihak lain dan mengajak orang-orang yang relevan dengan pembahasan untuk pengambilan keputusan.

3. *Laissez Faire*

Mendorong inisiatif dari banyak pihak agar bersama-sama memikirkan

bagaimana proses pengerjaan sampai menghasilkan.

4. Adaptive

Gaya kepemimpinan yang mengalir dan menyesuaikan gaya sesuai dengan keadaan lingkungan dan individu yang berpartisipasi.

Landasan dan Kepustakaan yang Relevan

1. Teori Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu social dapat dibagi ke dalam dua paradigme besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dan Tikson, 2005). Paradigm modernisasi mencakup teori – teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan social dalam teori – teori mikro tentang nilai – nilai individu yang menunjang proses perubahan.

Paradigma ketergantungan mencakup teori – teori keterbelakangan (*under development*) ketergantungan (*dependen-development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. pikir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam moleong, 2003 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang –orang dan perilaku yang dapat diamati. Dasar penelitian yang digunakan adalah studi survey yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan integrasi penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara

intensif, mendalam, mendetail dan komperhensif.

Berdasarkan bagan alur pikir maka definisi konsep sebagai berikut :

1. Pelayanan masyarakat yaitu upaya untuk memberikan sesuatu atau memfasilitasi orang (masyarakat) untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.
2. Pemberdayaan masyarakat yaitu kemampuan atau usaha untuk melakukan sesuatu/kemampuan bertindak untuk mendapatkan hasil.
3. Ketentraman dan ketertiban umum adalah upaya pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan kestabilan dalam wilayah pedesaan.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat fasilitas yang ada sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan fungsi.
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan yaitu pemberian pedoman standar pelaksanaa, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dilapangan. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa	= 1 orang
2. Kepala – kepala Seksi	= 3 orang
3. Kepala – kepala Urusan	= 3 orang
4. Anggota BPD	= 2 orang
5. Kepala Dusun	= 3 orang
6. Masyarakat	= 5 orang
Jumlah	=17 orang

Untuk klarifikasi data atau informasi yang diperoleh dari responden maka Kepala Desa Tampemadoro Kecamatan Lage

Kabupaten Poso sebagai Informasi Kunci (*Key Information*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah) dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul – betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagai datanya. Data yang salah atau tidak menggambarkan data empiris bisa menyesatkan peneliti, sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik/dibuat oleh peneliti bisa keliru.

Secara umum instrumen penelitian dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu instrument tes dan instrument non tes. Instrumen tes dapat berupa seperangkat tes sesuai kemampuan yang ingin diukur. Sedangkan instrument non tes dapat berupa kuisioner atau angket, observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi dan lokasi penelitian adalah di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso

Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan cukup luas dan kompleks. Hal yang diutamakan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan tugas – tugasnya menyangkut pengaturan dan pelayanan. Karena tanpa adanya bidang pengaturan dan pelayanan maka segala apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Pembangunan pada dasarnya merupakan

masalah yang kompleks yang menuntut keterlibatan semua pihak dan memerlukan penanganan dari semua segi. Dengan sendirinya pembangunan bangsa berjalan seiring dengan perubahan sosial.

Pendekatan secara konsep untuk mengkaji dari berbagai aspek yang terkait dengan peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso sebagaimana dalam pembahasan berikut :

1. Pelayanan Masyarakat

Upaya pelayanan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat atau melakukan kerjasama dengan masyarakat. Hal tersebut tentunya memerlukan perubahan perilaku bagi aparatur desa dalam pengembangan tugasnya. Pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang dilakukan oleh seseorang dalam mengabdikan dirinya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam bidang pemerintahan aparatur desa harus melayani sebaik mungkin kepada masyarakat, misalnya mengenai perkara – perkara tentang sengketa tanah, perkelahian, pelanggaran, kriminalitas, memberikan pelayanan dalam masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelayanan dalam bidang kemasyarakatan aparatur desa harus siap dalam wilayah pekerjaannya. Pemberian pelayanan seperti ini adalah pelayanan yang prima yang harus dimiliki oleh aparatur desa.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ternyata sebagian besar masyarakat menyatakan cara pelayanan aparatur desa dalam kaitan dengan pelaksanaan bidang pemerintahan adalah cukup baik. Hal ini terlihat dari kesediaan aparatur desa bekerja diluar jam kantor. Aparatur desa juga mudah ditemui karena berdomisili dekat kantor desa, dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan keperluannya dengan baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat dengan inisial HT pada Agustus 2019 bahwa :

“Pelayanan aparatur desa cukup baik, dapat dilihat bagaimana memperhatikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan karena kedekatannya dengan masyarakat, aparatur desa dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan rasa persaudaraan sehingga konflik – konflik yang mungkin akan terjadi dapat dihindari”.

Akan tetapi ada pula masyarakat yang menganggap pelayanan aparatur desa kurang baik, hal ini kemungkinan karena beberapa dari masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan aparatur yang menurut mereka terlalu lama. Tetapi menurut kepala desa dan aparaturnya ada beberapa masyarakat yang selalu menginginkan pelayanan yang cepat tetapi mereka tidak dapat melengkapi syarat – syarat yang telah ditentukan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan diperlukan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat mempunyai kemampuan dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat sebab tokoh masyarakat sering diakui sebagai pola panutan, menjadi pendorong dalam membangkitkan semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dilingkungannya. Tokoh masyarakat yang dimaksudkan antara lain adalah para guru, tokoh – tokoh masyarakat, tokoh – tokoh agama, Karang Taruna dan tokoh adat.

Dengan meningkatkan efektifitas kerja mereka maka usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh aparatur desa akan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Proses perencanaan pembangunan yang senantiasa berawal dari peran

masyarakat sebagai pelaku utama sehingga dalam pelaksanaan pembangunan baik bangunan fisik dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan *“Masih ada beberapa masyarakat yang kurang mengetahui tentang program – program apa saja yang diputuskan dalam musyawara desa (Musdes) atas program pembangunan dalam satu tahun berjalan”* wawancara agustus 2019

3. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum adalah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya ditumpukan pada pemerintah desa saja, tetapi juga seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memelihara keamanan di wilayah Desa Tampemadoro pada khususnya. Diantara beberapa upaya yang selama ini dilakukan oleh pihak aparatur desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa Tampemadoro, dilakukan melalui beberapa pendekatan – pendekatan, yang terurai sebagai berikut :

a). Pendekatan secara religius

Pendekatan secara religius ini ditempuh dengan melakukan pendekatan terhadap pemuka agama dan tokoh agama yang ada di Desa Tampemadoro. Melalui tokoh agama ini pesan – pesan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum disampaikan, selanjutnya pemuka agama tersebut dalam setiap kesempatan ibadah atau pertemuan – pertemuan keagamaan, dianjurkan untuk menyampaikan pesan – pesan tersebut.

b). Pendekatan secara kultural (budaya)

kemajemukan bangsamelahirkan beberapa budaya – budaya yang jika dikaji tidak seluruhnya bertentangan

bahkan terdapat budaya yang berkembang dalam satu suku juga berkembang menjadi kebiasaan pada suku yang lainnya. Perbedaan suku ini sesungguhnya berpotensi untuk dapat dipecah belah oleh oknum yang tidak menginginkan adanya ketentraman dan ketertiban. Perbedaan suku ini dapat dijadikan bahan untuk memperkaya dan mempererat antara suku dengan suku lainnya. Hal ini sangat tergantung bagaimana pihak pemerintah mau menjadikan perbedaan tersebut sebagai sebuah modal untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. bahwa masyarakat Desa Tampemadoro tentang peranan aparatur desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik seperti yang di utarkan oleh salah seorang anggota BPD mengatakan “ *desa kami dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban berjalan sesuai dengan yang di harapkan karena linmas desa dalam menjalankan tugasnya di dukung oleh babinkamtibmas desa Tampemadoro.*”

Wawancara tanggal Agustus 2019

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah sudah melakukannya dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat maupun aparatur desa Desa Tampemadoro untuk menjaga dan memelihara berbagai fasilitas yang ada. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Tampemadoro seperti Kantor Desa, Baruga, Jalan Raya, Pos Kambling, Polindesa, Kantor Polmas, LSPBM.

Bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana dapat berjalan baik, salah satu komentar dari kepala seksi “*Hal ini karena kepala desa sering menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Tampemadoro milik bersama sehingga*

apabila ada kerusakan maka masyarakat sendiri yang akan dirugikan” wawancara tanggal agustus 2019”.

Aparatur desa juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada masyarakat biasa dalam hal memelihara sarana dan prasarana yang ada baik dikantor desa maupun sarana dan prasarana di wilayah Desa Tampemadoro.

5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Jenis lembaga kemasyarakatan antara lain terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
- b. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- c. Tim Penggerak PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali dan penggerak pada masing – masing jenjang pemerintahan untuk melaksanakan program pkk.

- d. Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah
- e. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen sosial.

Usaha pemerintah dalam melakukan pembinaan pada lembaga kemasyarakatan adalah dengan pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pembangunan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat dengan inisial R pada bahwa, *“Pemerintah desa belum memberdayakan dan membimbing lembaga – lembaga kemasyrakatan yang ada di desa dengan maksimal, terbukti dari salah satu kelembagaan yang ada di Desa Tampemadoro belum ada melakukan kegiatan – kegiatan yang menonjol sesuai tugas dan fungsinya contohnya kelembagaan karang taruna”* wawancara agustus 2019.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

Terbatasannya sarana komunikasi

Saranan dan prasarana memberi peran penting dalam menunjang proses kerja dan tugas. Kurangnya fasilitas sarana dan

prasarana yang dimiliki pada Kantor Desa Tampemadoro. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat inisial K pada agustus 2019, yang mengatakan :

“minimnya sarana komunikasi benar – benar menghambat proses penyelesaian urusan pelayanan maupun tugas masyarakat di desa kami”.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minimnya sarana komunikasi berupa jaringan telepon kabel, terbatasnya sinyal telepon genggam dan lain sebagainya, merupakan beberapa faktor penghambat sulitnya aparat kecamatan menghubungi bila dibutuhkan masyarakat. Hal ini mengakibatkan waktu penyelesaian urusan pelayanan masyarakat relatif lebih lama dari waktu yang semestinya.

Sumber Daya Manusia

Disampig dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti ruang kerja dan komputer atau leptop , faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah kemampuan aparaturnya sendiri. Dalam hal ini kemampuan aparaturnya desa menggunakan sarana penunjang kerja seperti komputer guna menyusun dokumen.

Salah kesulitan adalah kemampuan menguasai komputer sebagian aparaturnya desa tidak bisa menggunakan komputer. Padahal di zaman sekarang ini, hal itu juga merupakan tuntutan kerja.

KESIMPULAN

1. Peranan aparaturnya desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk masyarakat cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa tanggapan informan. Dalam tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat berjalan baik, pemberdayaan masyarakat juga dapat berjalan baik, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berjalan baik, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum juga berjalan baik,

dan terakhir pembinaan lembaga kemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan adalah terbatasnya sarana komunikasi dan sumber daya manusia (SDM).

SARAN

1. Kepala desa dan aparaturnya sebaiknya memperhatikan masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan di dalam desa. Masyarakat tersebut harus didekati dengan baik agar kesejahteraan tetap dimiliki oleh semua masyarakat tidak terkecuali.
2. Demi menunjang kelancaran proses pemerintahan di Desa Tampemadoro sebaiknya kepala desa selalu mengadakan evaluasi melibatkan aparatur pemerintah, tokoh – tokoh masyarakat dn ketua – ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tampemadoro.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku – buku

- Hoogerwerf, A.,1983, *Ilmu Pemerintahan, Erlangga*, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1986. *Pokok – Pokok Kebijakan Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah*. Rajawali Jakarta
- Sugiono, 2008. *Konsep Pembangunan Desa*, Jakarta. Gramedia
- Stogli, *Konsep Peranan*. Dalam Giroth 2003:25
- Anwar, 2005, *Konsep Pembangunan Desa*, Jakarta. Gramedia
- Anwar, 2000. *Administrasi dan Efisiensi Kerja*, Percetakan RI Jakarta
- Ndaraha, *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Pembangunan Desa*

dan Administrasi Pemerintah Desa . Penerbit,Yayasan Karya Dharma. Jakarta 1990:116

- Wibawa, *Peranan Sebagai Hubungan Perilaku*, 2004:27
- Arikunto, Suharimi, 1996, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta Jakarta
- Soekanto, *Pengertian Peranan*. Rajawali Jakarta 2001:268
- Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Judistira, *Teori Peranan*, dalam Giroth (2004:25).
- Giroth, *Faktor yang Menentukan Peranan*. 2004:27
- Siagian, *Administrasi Pembangunan ,Peranan Pemerintah dalam Pembangunan*. Cv. Haji Masagung Jakarta 2000:116
- WJS Poerwadarmita (1983:165), *Pengertian Aparatur*. Soewarno Handyaningrat (1980: 37)
- Viktor Situmorang dan Jusuf Juhir. *Peran dan Fungsi Aparatur Pemerintah*. Jakarta,(1998:83-86).
- Poerwadaraminta W.J.S., 197.*Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Poerwadaraminta, W.J.S., 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*,Yayasan Beringin Korpri unit Depdagri, Jakarta.(1990:10). Saparin, 1986:21. Media Bandung.
- Tadaro, *Pembangunan sebagai Perubahan Sosial*. Dalam Ndraha 1986:4-5.
- Tead, *Kepemimpinan*. Dalam Kartono, 2003.
- Soekanto Suryono, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta, GhaliaIndonesia, 1997.
- Sarjono Soekanto (2006), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers.

S.P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*,
CV. Haji Masagung, Jakarta, (1985:1-
5).

B. Sumber – Sumber Lain

Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang pemerintahan daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia